



Pemkot Bedah Indikator Kota Inklusi

YOGYA (KR) - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewujudkan wilayahnya sebagai kota inklusi terus digenjut. Indikator kota inklusi pun mulai disusun melibatkan multi pihak yang selama ini fokus menangani persoalan disabilitas.

Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, indikator tersebut sangat penting guna menjadi acuan penyusunan naskah akade-

mik penyusunan regulasi. "Rabu (22/4) kemarin kami gelar workshop terkait indikator kota inklusi. Memang harus ada sinergi antara pemerintah dengan LSM serta organisasi sosial yang memiliki perhatian terhadap disabilitas," paparnya, Kamis (23/4).

Beberapa pihak yang terlibat antara lain Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHD) Kota Yogyakarta, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) serta berbagai instansi dan komite di lingkungan

Pemkot.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edy Muhammad sebelumnya menjelaskan, pihaknya memang tengah menggandeng sejumlah pihak yang berkompeten guna mewujudkan kota inklusi. Akses bagi seluruh masyarakat tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan sarana dan prasarana fisik tetapi juga meliputi kebutuhan non fisik berupa kesempatan bekerja terutama bagi warga berkebutuhan khusus. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005